



**Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional:  
Pengaruh Isu “Comfort Women” terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan**

**Fiandara Dwi Adityani**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Japan and South Korea have a complicated relations ever since Japan's occupation in Korean Peninsula in 1910. During Japan's occupation, Japanese military abducted thousands of Korean women to work in a military brothel and serve as a sex slaves for Japanese forces, or known as “comfort women”. Trauma left by Japanese colonial rule created mutual animosities which hamper bilateral relations between both countries. In 2012, South Korea back off from the first military cooperation pact with Japan, due to overflow public resentment in South Korea toward Japan. The objective of this research is to understand how “comfort women” issue impacted bilateral security cooperation between Japan and South Korea. This research used qualitative methods alongside with the concept of memory, war, and world politics to explain how memory and trauma shape South Korean's perception toward Japan, as well as the concept of Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies to explain the impact of public opinion toward South Korea's foreign policy. The result of this research indicated that history of “comfort women” created collective memory in South Korea, which hampers its bilateral security cooperation with Japan. The bilateral security cooperation between Japan and South Korea established only after two nations reach consensus in “comfort women” issue.

**Keywords:** *Japan, South Korea, “comfort women”, memory, trauma, public opinion, security cooperation*

**Pendahuluan**

Jepang dan Korea Selatan adalah negara yang memiliki kedekatan geografis, dan berbagai persamaan nilai dan budaya, akan tetapi hubungan bilateral kedua negara sering kali mengalami ketegangan, dimana faktor utama pemicunya adalah sejarah. Pada tahun 1910, semenanjung Korea secara resmi menjadi bagian dari Koloni Jepang. Pada masa pendudukannya tersebut, militer Jepang yang pada saat itu berkuasa banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang kejam bagi rakyat Korea, seperti melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korea untuk menerima sistem penamaan Jepang, serta salah satu yang paling kontroversial adalah rekrutmen secara paksa yang dilakukan terhadap wanita-wanita Korea untuk dijadikan sebagai “comfort women” atau budak seks tentara Jepang (Lankov, 2015).

Kebijakan dan perlakuan-perlakuan Jepang di masa lalu tersebut ternyata meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Korea Selatan, dan pada akhirnya menimbulkan sentimen atau persepsi negatif dalam memandang Jepang. Bahkan, sentimen anti Jepang ini juga ditemukan di kalangan muda masyarakat Korea Selatan, yang

*notabene* tidak terlibat dalam era penjajahan Jepang pada masa itu. Contohnya, pada survey yang dilakukan oleh Koran *Donga* di Korea Selatan pada tahun 1990, 66% responden menyatakan tidak menyukai Jepang (Gi-Wook & Sneider, 2007). Kemudian, pada beberapa survey serupa yang dilakukan hingga tahun 2005, persentase ketidaksukaan masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang ini konstan tinggi, dengan lebih dari 50% responden menyatakan tidak menyukai Jepang (Gi-Wook & Sneider, 2007).

Ketegangan hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan disebabkan tuntutan masyarakat Korea Selatan terhadap pemerintah Jepang untuk mengakui keterlibatan pemerintah Jepang di masa lalu dalam terciptanya sistem “*comfort women*”, serta bertanggung jawab terhadap korban “*comfort women*” di Korea Selatan. Isu ini kemudian kian berlarut-larut karena adanya inkonsistensi dari pemerintah Jepang dalam mengakui keterlibatan pemerintahannya di masa lalu dalam terbentuknya sistem “*comfort women*”, sehingga isu ini terus menghambat Jepang dan Korea Selatan dalam memaksimalkan hubungan bilateral antar kedua negara. Namun, pada tahun 2015 tercapai kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan dalam menyelesaikan konflik “*comfort women*”. Kesepakatan ini kemudian berdampak pada terbentuknya kerjasama keamanan bilateral antara kedua negara pada akhir tahun 2016. Kerjasama keamanan ini merupakan langkah yang amat bersejarah bagi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, karena merupakan kerjasama keamanan bilateral pertama kedua negara setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Penelitian ini menggunakan konsep *memory, war, and world politics* menurut pemikiran Duncan Bell (2006) untuk menjelaskan mengenai pentingnya pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan keadaan di masa sekarang. Menurut konsep ini, memori adalah proses dimana ingatan mengenai kejadian atau impresi yang berasal dari masa lalu dihimpun (Bell, 2006, hal. 2). Kemudian, secara khusus Bell juga mendefinisikan memori kolektif atau *collective memory* sebagai persepsi bersama akan sejarah atau masa lalu (Bell, 2006, hal. 2). Korelasi akan pentingnya memori dan trauma dengan preferensi negara di masa sekarang, adalah memori akan trauma di masa lalu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi politik, afiliasi, dan tindakan negara (Bell, 2006, hal. 5). Dalam praktiknya, kebijakan atau tindakan yang diambil negara dapat merupakan hasil atau bagian dari memori kolektif atau kenangan akan masa lalu yang mendarah daging dalam negara tersebut, yang kemudian mendasari persepsi politik dan kebijakan yang diambil negara. Hal ini dikarenakan luka yang disebabkan oleh trauma biasanya tidak mudah untuk disembuhkan yang kemudian mendorong berbagai tindakan untuk menunjukkannya, sehingga memori akan trauma tersebut kemudian menyebar dari satu orang ke orang lainnya dalam masyarakat tersebut (Bell, 2006, hal. 7). Menurut konsep ini pula, untuk dapat melangkah dari belenggu memori dan trauma kelompok atau individu harus dapat menunjukkan pertanggungjawaban atas ketidakadilan yang dilakukan di masa lalu (Bell, 2006, hal. 21). Penelitian ini akan mengangkat dua aspek penting dalam konsep ini yaitu memori dan trauma, yang mempengaruhi pandangan Korea Selatan terhadap Jepang.

Selain konsep di atas, penelitian ini juga akan menggunakan konsep *public opinion, domestic structure, and foreign policy in liberal democracies* menurut pemikiran Thomas Risse-Kappen (1991). Dalam konsep ini Thomas Risse menjelaskan bagaimana aspek domestik dalam hal ini opini publik mempengaruhi kebijakan luar negeri atau tindakan yang diambil oleh suatu negara. Menurut konsep ini, opini publik dapat mempengaruhi kebijakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung (Risse, 1991, hal. 510). Opini publik mempengaruhi kebijakan negara secara langsung apabila opini tersebut dapat merubah kebijakan atau tujuan kebijakan, ataupun bagaimana kebijakan tersebut diprioritaskan atau diimplementasikan. Akan tetapi, opini publik juga dapat mempengaruhi

kebijakan yang diambil negara secara tidak langsung dengan mempengaruhi proses pembentukan koalisi, yaitu dengan memperkuat atau melemahkan aktor politik atau sosial tertentu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Besar atau tidaknya derajat pengaruh opini publik terhadap sebuah kebijakan sangat bergantung pada fragmentasi sosial dan struktur domestik negara (Risse, 1991, hal. 511). Semakin homogen masyarakat pada sebuah negara, maka semakin mudah opini publik dapat mempengaruhi kebijakan negara tersebut, selain itu pada struktur negara yang lemah atau *weak state*, maka pengaruh opini publik terhadap kebijakan luar negeri yang diambil negara akan lebih besar ketimbang terhadap struktur domestik negara yang kuat atau *strong state* (Risse, 1991, hal. 486). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana opini publik Korea Selatan yang terbentuk melalui memori dan trauma terhadap Jepang terkait isu “*comfort women*”, menghambat kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.

Argumen peneliti dalam penelitian ini adalah, trauma akan sistem “*comfort women*” pada masa penjajahan Jepang di semenanjung Korea membentuk opini publik Korea Selatan berupa persepsi negatif terhadap Jepang, yang kemudian menghambat kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Kemudian, Jepang dan Korea Selatan berhasil membentuk kerjasama keamanan bilateral dikarenakan membaiknya hubungan bilateral kedua negara paska penyelesaian isu “*comfort women*”.

## **Pembahasan**

Kemenangan Jepang dalam perang pertama Cina-Jepang (1894-1895) dan Russo-Jepang (1904-1905), merupakan momentum yang menjadikan Jepang sebagai kekuatan imperialis baru di Asia Timur dan semakin mendorong Jepang dalam melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia (Sang-Sook, 2011). Tersebarnya tentara Jepang di berbagai wilayah jajahan Jepang, mendorong pemerintah Jepang untuk menciptakan sistem “*comfort women*” untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara Jepang, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap pemerkosaan dan penyakit menular seksual di kalangan tentara Jepang (Koh, 2007). Ketika pertama kali membangun “*comfort station*”, yaitu tempat dimana wanita-wanita korban “*comfort women*” ditempatkan, militer Jepang juga menetapkan sendiri berbagai kebijakan, harga, struktur, jadwal dan menyediakan dokter untuk memeriksa wanita-wanita tersebut secara berkala dan memastikan mereka bebas dari penyakit menular seksual (Center for Research on Globalization, 2015). Sebagai salah satu wilayah jajahan Jepang, diperkirakan, hampir 80% dari “*comfort women*” berasal dari Korea (Arakawa, 2013). Wanita-wanita ini direkrut secara paksa sebagai budak seks bagi tentara Jepang, dan diperlakukan secara tidak manusiawi selama berada di “*comfort station*”.

Tindakan pemerintah Jepang tersebut, kemudian meninggalkan luka yang amat dalam pada masyarakat Korea Selatan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya inisiatif dari pemerintah Jepang untuk mengakui keterlibatan militer Jepang dalam sistem “*comfort women*” dan bertanggung jawab terhadap korban “*comfort women*” di Korea Selatan. Sebenarnya Jepang pernah mengakui keterlibatan militer Jepang dalam sistem “*comfort women*” pada tahun 1993 dalam pernyataan yang disebut “*Kono Statement*”, akan tetapi, karena tidak adanya tindak lanjut dari pernyataan tersebut, serta pemerintah Jepang berikutnya yang tidak konsisten dalam mempertahankan pernyataan tersebut, tuntutan masyarakat Korea Selatan bagi pemerintah Jepang terkait isu “*comfort women*” terus bergulir.

Pada sebuah polling yang dilakukan di Korea Selatan terkait persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang di tahun 2013, 77% responden menyatakan memiliki persepsi negatif terhadap Jepang dikarenakan permintaan maaf Jepang yang tidak tulus terkait isu sejarah (The Genron NPO, 2013). Pada survey yang sama, 61,5% responden

Korea Selatan juga menyatakan isu “*comfort women*” merupakan hal pertama yang mereka pikirkan ketika mendengar kata Jepang (The Genron NPO, 2013). Ketika survey yang sama dilakukan di tahun 2014 respon mayoritas responden Korea Selatan masih relatif sama, dimana alasan utama persepsi negatif mereka terhadap Jepang adalah isu “*comfort women*” dan permintaan maaf pemerintah Jepang yang tidak tulus. Hal ini menunjukkan bagaimana konflik “*comfort women*” yang berkembang sedemikian rupa mempengaruhi pandangan masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang.

Dalam mengemukakan kekecewaan dan tuntutan mereka terhadap pemerintah Jepang, para korban “*comfort women*” di Korea Selatan mengadakan demonstrasi mingguan. Demonstrasi ini telah dilaksanakan sejak Januari 1992 setiap hari Rabu di depan kedutaan Jepang di Korea Selatan. Demonstrasi ini kemudian mencapai puncaknya di tahun 2011, dimana para demonstran membangun sebuah patung yang melambangkan “*comfort women*” tepat di seberang kedutaan Jepang di Korea Selatan, yang kemudian mengundang reaksi keras pemerintah Jepang, yang berlandaskan *Vienna Convention on Diplomatic Protocol article 22*<sup>1</sup>. Akan tetapi, dengan dorongan publik yang sedemikian rupa, pemerintah Korea Selatan tidak dapat berbuat apa-apa terkait hal tersebut.

Dampak penolakan publik Korea Selatan terhadap Jepang yang sangat signifikan terjadi di tahun 2012. Dimana, pada saat itu seharusnya Jepang dan Korea Selatan menandatangani kerjasama keamanan bilateral pertama antar kedua negara sejak berakhirnya Perang Dunia II. Pakta perjanjian ini akan mencakup *Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA)* dan *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)*. ACSA mengatur mengenai kerja sama kedua negara dalam memenuhi pasokan jasa dan material yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi perdamaian di negara lain, sedangkan GSOMIA lebih berfokus dalam mengatur bagaimana kedua negara dapat saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan strategi di bidang militer, sehingga jika terjadi perang, kedua negara dapat saling bertukar informasi dan strategi perang untuk melindungi kedua negara (Seongho & Kim, 2012). Korea Selatan telah menyepakati perjanjian serupa dengan 24 negara lainnya sebelumnya, akan tetapi karena adanya demonstrasi dan penolakan publik yang tidak dapat dibendung, pemerintah Korea Selatan harus terpaksa membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut hanya sesaat sebelum ditandatangani.

Dalam peristiwa ini, dapat dilihat pentingnya pengaruh sejarah atau trauma yang ditinggalkan masa penjajahan Jepang terhadap korban “*comfort women*” dalam membentuk memori kolektif yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap Jepang. Selama kurang lebih tiga dekade penjajahan Jepang di semenanjung Korea, masyarakat Korea berjuang untuk memulihkan kembali martabat dan harga diri bangsa akibat penjajahan Jepang. Ketika pemerintah Jepang tidak mengakui dan meminta maaf akan perbuatannya di masa lalu, maka persepsi negatif akan Jepang terus bertahan pada masyarakat Korea Selatan. Hal yang kemudian semakin memudahkan meluasnya persepsi negatif pada Jepang adalah identitas nasional masyarakat Korea Selatan yang berdasarkan pada masyarakatnya yang homogen. Masyarakat Korea mendefinisikan identitasnya sebagai masyarakat “*immutable*” atau “*primordial*” melalui konsepsi keturunan darah Korea (*hyolt’ ong*) atau dalam bahasa Jepang *tanil minjok* atau *tanitsu minzoku*, yang berarti mereka berasal dari bangsa yang satu, etnis yang sama, dan ras yang istimewa (Shin, 1999, hal. 469). Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat Korea Selatan memiliki rasa persatuan dan nasionalisme yang kuat karena merasa memiliki darah dan keturunan yang sama. Karena ikatan yang kuat tersebut, maka masyarakat Korea merasa sudah merupakan sebuah tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan sesama

---

<sup>1</sup> Kerangka perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik, hak istimewa, dan kekebalan misi diplomatik di negara tuan rumah (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*)

masyarakatnya. Oleh karena itu, berbagai kalangan masyarakat di Korea Selatan turut terlibat dalam demonstrasi yang bertahun-tahun lamanya untuk menuntut pertanggung jawaban Jepang terhadap korban “*comfort women*” di Korea Selatan.

Struktur masyarakat Korea Selatan yang homogen kemudian juga merupakan salah satu faktor yang menjelaskan bagaimana opini publik kemudian dapat mempengaruhi pembatalan kerjasama keamanan bilateral pertama antara Jepang dan Korea Selatan di tahun 2012. Pada masyarakat Korea Selatan yang homogen, rasa nasionalisme dan saling memiliki yang berdasar pada sentimen anti-Jepang lebih mudah meluas pada masyarakatnya. Kemudian, perkembangan teknologi yang pesat juga memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat Korea Selatan untuk dapat berpartisipasi dalam politik dan kebijakan yang diambil negara (Chang, 2017). Oleh karena itu, ketika mengetahui bahwa pemerintah akan melakukan kerjasama keamanan dengan Jepang, publik Korea Selatan serta-merta menentang adanya kerjasama tersebut dengan demonstrasi yang kemudian berhasil menggagalkan disepakatinya kerjasama keamanan yang seharusnya menjadi kerjasama keamanan bilateral pertama antara Korea Selatan dan Jepang.

Melihat antipati rakyat Korea Selatan terhadap Jepang yang semakin meningkat, Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, yang resmi dilantik pada awal tahun 2013, menegaskan sejak awal pemerintahannya, bahwa Jepang harus dapat memulai inisiatif untuk dapat menyelesaikan konflik sejarah untuk dapat membangun kembali hubungan bilateral yang berorientasi ke depan dengan Korea Selatan (Glosserman & Synder, 2015, hal. 107). Ia juga menyatakan tidak akan mengadakan pertemuan bilateral formal apapun dengan Shinzo Abe selama pemerintah Jepang belum menyatakan permintaan maaf yang tulus dan memberikan kompensasi kepada korban “*comfort women*” di Korea Selatan.

Menyadari ketegasan pemerintah Korea Selatan terkait isu “*comfort women*”, pemerintah Jepang pun mulai mengubah posisinya. Pada pertengahan tahun 2014 pada akhirnya Abe menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan melakukan perubahan apapun terhadap “*Kono Statement*” dan pernyataan maaf yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang sebelumnya terkait isu “*comfort women*” (Sieg, 2014). Di dorong oleh pernyataan tersebut pemerintah Jepang dan Korea Selatan mulai kembali aktif dalam memulai perundingan terkait penyelesaian konflik “*comfort women*”. Kedua pemerintah juga sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya.

Sebagai tindak lanjutnya, pada akhirnya perjanjian mengenai penyelesaian akhir “*comfort women*” disepakati Jepang dan Korea Selatan di akhir tahun 2015. Dalam kesepakatan ini, Jepang telah mengakui keterlibatan militer Jepang dalam terbentuknya sistem “*comfort women*” di masa lalu, dan telah berjanji akan memberikan tanggung jawab material bagi korban “*comfort women*”, yang akan dialokasikan langsung oleh pemerintah Jepang sesuai dengan tuntutan masyarakat Korea Selatan selama ini. Korea Selatan juga menyatakan tidak akan lagi mengungkit isu “*comfort women*” dan mengkritisi pemerintah Jepang terkait isu tersebut selama pemerintah Jepang dapat konsisten dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Salah satu dampak penting penyelesaian konflik “*comfort women*” antara Jepang dan Korea Selatan adalah disepakatinya pakta kerjasama keamanan bilateral pertama antara Jepang dan Korea Selatan satu tahun setelahnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kerjasama keamanan ini sempat dibatalkan karena memanasnya konflik “*comfort women*” antar kedua negara. Melalui perjanjian ini kedua pemerintahan dapat berbagi informasi militer mengenai segala sesuatu yang dikategorikan sebagai ancaman dari Korea Utara, secara langsung tanpa harus melalui Amerika Serikat sebagai *hub*.

Analisis di atas mungkin akan memicu kontra argumen salah satunya mengenai faktor meningkatnya ancaman dari uji coba nuklir Korea Utara, dengan kata lain faktor uji

coba nuklir Korea Utara lah yang mendorong disepakatinya kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Argumen tersebut masuk akal, mengingat ke dua negara memiliki kekhawatiran yang sama terhadap ancaman nuklir Korea Utara, akan tetapi penelitian ini berpendapat bahwa faktor pendorong kerjasama tersebut bukan karena isu nuklir Korea Utara, melainkan semata-mata karena terbentuknya penyelesaian “*comfort women*” antara Jepang dan Korea Selatan. Jika pernyataan terbentuknya kerjasama tersebut karena ancaman nuklir Korea Utara benar adanya, maka semestinya kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan sudah dilakukan sejak pertama kali uji coba nuklir tersebut dilakukan. Faktanya meskipun Korea Utara telah berulang kali melakukan uji coba tersebut, kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan tidak pernah terbentuk.

Korea Utara melakukan tes uji coba nuklir pertamanya pada 9 Oktober 2006. Uji coba ini sangat mengejutkan baik Jepang maupun Korea Selatan. Setelah uji coba tersebut, pemerintah Jepang mengerahkan pesawat latih T-4 untuk memeriksa tingkat radioaktivitas di area sekitar yang terkena dampak uji coba nuklir Korea Utara (Mathur, 2006). Selain itu, pemerintah Jepang juga memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi unilateral kepada Korea Utara. Sanksi yang diberikan Jepang diantaranya adalah larangan perdagangan, dimana kapal-kapal Korea Utara dilarang untuk memasuki pelabuhan Jepang, selain itu Jepang juga melarang masuknya warga negara Korea Utara ke Jepang, kecuali bagi mereka yang telah memiliki izin tinggal di Jepang (MacAskill, 2006). Sejalan dengan Jepang, Korea Selatan merespon uji coba ini dengan meningkatkan anggaran pertahanan darurat untuk mengakomodasi senjata nuklir Korea Utara.

Pada tahun 2009 ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang kedua, Jepang dan Korea Selatan kembali mengecam tindakan tersebut. Kemudian, Jepang dan Korea Selatan, bersama Amerika Serikat terlibat dalam merumuskan UNSCR 1874<sup>2</sup>, yang bertujuan untuk mendorong adanya resolusi yang lebih tegas terhadap Korea Utara, salah satunya dengan memungkinkan adanya penggunaan paksaan dalam melakukan inspeksi kargo-kargo kapal Korea Utara yang diduga membawa barang-barang terkait *Weapon of Mass Destruction* (WMD) (Nuclear Threat Initiative, 2009).

Meskipun begitu, seakan tidak memperdulikan kecaman komunitas internasional dan sanksi yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang ke tiga pada bulan Februari 2013. Baik Jepang maupun Korea Selatan merespon uji coba tersebut dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat Korea Selatan menyepakati perjanjian dengan Amerika Serikat, berupa “*counter provocation plan*” yang memuat bagaimana Korea Selatan dapat memberikan serangan balasan terhadap provokasi Korea Utara dengan dukungan militer Amerika Serikat, sedangkan Jepang mengandalkan dukungan persenjataan Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat mempersenjatai Jepang dengan *land-based PATRIOT Advanced Capability-3* (PAC-3) dan *Standard Missile* (SM-3) pada kapal perangnya, dan memasukkan Jepang dalam program *Ballistic Missile Defense* (BMD) yang dipimpin Amerika Serikat, serta mendirikan Pusat Komando Operasi Bersama Jepang – Amerika Serikat di Pangkalan Udara Yokota (Bechtol, 2013).

Di Tahun 2016, ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke empat, Jepang dan Korea Selatan telah menyepakati kerjasama keamanan trilateral dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, dalam merespon uji coba tersebut, Obama, Shinzo Abe, dan Park Geun-hye berunding dan mencapai kesepakatan bahwa perilaku Korea Utara

---

<sup>2</sup> UNSCR 1874 adalah resolusi yang dikeluarkan dewan keamanan, terkait sanksi yang diberikan kepada Korea Utara menanggapi uji coba nuklirnya di tahun 2009. Tujuan utama dari sanksi ini adalah memblokir dukungan material maupun pendanaan nuklir Korea Utara. (United Nations Security Council, 2009)

tersebut tidak dapat ditoleransi, dan diperlukan respon internasional yang tegas untuk menanggapi hal tersebut. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Jepang juga menyatakan akan memberikan suaranya untuk meminta tindakan atau sanksi multilateral baru terhadap Korea Utara, sekaligus mempertimbangkan memperkuat kembali sanksi bilateral yang pernah diberikan Jepang sebelumnya setelah uji coba nuklir Korea Utara di tahun 2006

Akan tetapi, tidak disangka di tahun yang sama, tujuh bulan setelahnya Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang ke lima. Dalam menanggapi hal ini, Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan kembali mengadakan pertemuan trilateral untuk membahas respon ketiga negara. John Kerry Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mewakili Jepang dan Korea Selatan, menyatakan bahwa Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya akan memastikan Korea Utara akan menyadari bahwa tindakannya hanya akan membuat negaranya semakin terisolasi dan merampas kesempatan pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya (“Japan, U.S., South Korea”, 2016). Ketiga pemerintah juga menyatakan akan bekerja sama untuk memastikan setiap negara benar-benar menjalankan sanksi yang telah ditetapkan PBB terhadap Korea Utara. Dalam kesempatan lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ash Carter juga menyatakan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dalam menanggapi serangan apapun yang mengancam aliansi Amerika Serikat atau ancaman terkait provokasi nuklir Korea Utara (“U.S. Warns”, 2016).

Dalam akhir pembahasan ini penulis menekankan bahwa terlepas dari lima uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara, kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan tidak pernah terwujud. Akan tetapi, kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan terbentuk hanya setelah kedua negara mencapai konsensus terkait isu “*comfort women*”.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Trauma akan perlakuan Jepang terhadap korban “*comfort women*” yang mempermalukan dan merendahkan martabat bangsa Korea, kemudian menimbulkan adanya sentimen anti Jepang pada masyarakat Korea Selatan yang tercermin pada opini publik Korea Selatan. Persepsi negatif ini terus meluas dan diturunkan kepada generasi selanjutnya di Korea Selatan, dan semakin diperburuk dengan adanya perilaku dan pernyataan-pernyataan pemerintah Jepang terkait “*comfort women*” yang kerap kali memprovokasi masyarakat Korea Selatan, hingga akhirnya secara langsung menghambat terbentuknya kerjasama keamanan bilateral antar kedua negara.

Oleh karena itu, penelitian ini menunjukka terlepas dari ancaman berupa uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara, kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan tidak pernah terwujud. Kerjasama keamanan kedua negara baru berhasil disepakati ketika kedua negara telah menyelesaikan konflik “*comfort women*”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam menambah literatur tentang studi hubungan internasional melalui sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Yaitu, melihat bagaimana pengaruh isu sejarah, khususnya dalam konsep memori dan trauma dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

## **Referensi**

Arakawa, M. (2013). A New Forum for Comfort Women: Fighting Japan in United States Federal Court. *Berkeley Journal of Gender, Law & Justice*.

- Bechtol, B. E. *South Korea: Responding to the North Korean threat*. 5 November 2013. <http://www.aei.org/publication/south-korea-responding-to-the-north-korean-threat/>. Diakses pada 11 Desember 2016.
- Bell, D. (2006). *Memory, Trauma, and World Politics: Reflections on the Relationship between Past and Present*. London: Palgrave Macmillan UK.
- Centre for Research on Globalization. (2015). *Fact Sheet on Japanese Military "Comfort Women"*. <http://www.globalresearch.ca/fact-sheet-on-japanese-military-comfort-women/5449039>. Diakses pada 18 November 2016.
- Chang, H. J. *South Koreans Worked a Democratic Miracle. Can They Do It Again?* . 14 September 2017. <https://www.nytimes.com/2017/09/14/opinion/south-korea-social-mobility.html>. Diakses pada 30 November 2017.
- Fox News. *US warns of 'overwhelming' response to North Korean nuke use*. 19 Oktober 2016. <http://www.foxnews.com/politics/2016/10/19/us-warns-overwhelming-response-to-north-korean-nuke-use.html>. Diakses pada 11 Desember 2017.
- Glosserman, Brad., Scott A. Synder. (2015). *The Japan-South Korea Identity Clash*. New York: Columbia University Press.
- Koh, Jinyang, "Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present" (2007). LLM Theses and Essays. Paper 79. [http://digitalcommons.law.uga.edu/stu\\_llm/79](http://digitalcommons.law.uga.edu/stu_llm/79).
- Lankov, A. "South Korea's Nationalist Passion". 10 Maret 2015. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/03/south-korea-nationalist-passions-150308050755645.html>. Diakses pada 15 September 2016.
- MacAskill, E., Jonathan Watts. *Japan bans all trade with North Korea*. 12 October 2006. <https://www.theguardian.com/world/2006/oct/12/japan.northkorea1>. Diakses pada 11 Desember 2017
- Mathur, A. *Japan's Response to North Korea Nuclear Test*. Oktober 2006. [https://idsa.in/strategicanalysis/JapansResponsetoNorthKoreasNuclearTest\\_amathur\\_1006](https://idsa.in/strategicanalysis/JapansResponsetoNorthKoreasNuclearTest_amathur_1006). Diakses pada 11 Desember 2017.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015). *Japan-ROK Foreign Ministers' Meeting*. [http://www.mofa.go.jp/a\\_o/na/kr/page3e\\_000350.html](http://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page3e_000350.html). Diakses pada 6 September 2017.
- Nuclear Threat Initiative. *North Korea's Nuclear Test and its Aftermath: Coping with the Fallout*. 25 Juni 2009. <http://www.nti.org/analysis/articles/north-koreas-nuclear-test-aftermath/>. Diakses pada 11 Desember 2017.
- Risse, T. (1991). Public Opinion, Domestic Structure, and Foreign Policy in Liberal Democracies. *World Politics*, 479-512.
- Sang-Sook, J. (2011). The Characteristics of Japanese Colonial Rule in Korea. *The Journal of North East Asian History*.
- Seongho, S., & Kim, J. (2012). What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact. *Asia Pacific Buletin*, pp. 1-2.
- Shin, G.-W., Sneider, D. C., & Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center. (2007). *Cross currents: Regionalism and nationalism in Northeast Asia*. Stanford, CA: Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center, Stanford University
- Sieg, L. *Japan's Abe Says Won't Alter 1993 Apology on "Comfort Women"*. 14 Maret 2014. <http://www.reuters.com/article/us-japan-korea/japans-abe-says-wont-alter-1993-apology-on-comfort-women-idUSBREA2D04R20140314>. Diakses pada 6 September 2017.
- South China Morning Post. *"Tokyo Reacts to Anti-Japanese Sentiment in South Korea"*. South China Morning Post. 21 November 2013. <http://www.scmp.com/news/asia/article/1361049/tokyo-reacts-anti-japanese-sentiment-south-korea>. Diakses pada 19 September 2016.

- The Genron NPO. (2013). *The 1st Japan-South Korea Joint Opinion Poll*.
- The Genron NPO., East Asia Institute (EAI). (2014). *The 2nd Joint Korea-Japan Public Opinion Poll*. [www.genron-npo.net](http://www.genron-npo.net). Diakses pada 19 November 2016.
- The Japan Times. *Japan, U.S., South Korea discuss coordinated response to North Korean nuclear test*. <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/09/19/national/japan-u-s-south-korea-condemn-nuke-test-north-korea/#.WjAk4Ull-00>. Diakses pada 11 Desember 2017.
- United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations*. [http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9\\_1\\_1961.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf). Diakses pada 1 Desember 2016.
- United Nations Security Council. *Strongest Terms Democratic People's Republic of Korea Nuclear Test, Toughens Sanctions*. 12 Juni 2009. <https://www.un.org/press/en/2009/sc9679.doc.htm>